

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan ekonomi suatu negara sering dikaitkan dalam pembangunan ekonomi dengan tujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan di setiap daerah yang pada akhirnya akan mempercepat pembangunan nasional dan berbagai kegiatan pembangunan dari seluruh sektor ekonomi harus berjalan seiring dan seimbang. Pembangunan dalam pembangunan ekonomi suatu negara merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk mengubah ekonomi yang tidak berkembang, tradisional, dan berpenghasilan rendah menjadi ekonomi modern yang sangat maju dan makmur. Menurut Sukirno (2012), pembangunan ekonomi masyarakat hanya dapat dicapai jika pertumbuhan pendapatan per kapita dipertahankan dalam jangka panjang.

Pemerintah daerah memiliki peran untuk terus berupaya meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di adakan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara. Penyelenggaraan otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, substansial, dan

proporsional kepada pemerintah daerah dengan mengatur alokasi dan penggunaan sumber daya nasional serta stabilitas keuangan pusat daerah, kewenangan ini diberikan.

Pemerintah pusat memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah dalam upaya mempercepat pembangunan suatu daerah dan mendorong mereka untuk memaksimalkan potensinya guna memajukan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing dalam upaya meningkatkan kapasitas daerah merupakan bagian integral dari operasi pembangunan nasional. Pemerintah daerah dan masyarakat bekerja sama untuk mengelola sumber daya yang ada dan melaksanakan proyek pembangunan daerah sebagai proses yang dikenal sebagai pembangunan ekonomi daerah yang mengakibatkan mereka harus mampu mengevaluasi sumber daya prospektif yang diperlukan untuk merencanakan dan menumbuhkan wilayah ekonomi. Dengan bantuan pemerintah pusat, pembangunan daerah bertujuan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah

menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dukungan pemerintah pusat harus diminimalkan, daerah otonom harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi mayoritas pendapatan keuangan daerah. Diberlakukannya pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dapat memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk berkembang dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Setiap pemerintah daerah berupaya untuk dapat memperkuat perekonomian daerahnya sendiri termasuk mendorong perolehan modal melalui PAD. Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan, sejalan dengan pembangunan ekonomi, tanpa mengurangi alokasi faktor produksi dan pemerataan. Sumber daya keuangan daerah atau pendapatan asli daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam otonomi daerah yang benar-benar dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah harus dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, dan ini merupakan peluang yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam menjalankan kewenangan yang menjadi milik daerah. Secara umum, suatu daerah dianggap siap untuk melaksanakan otonomi daerah jika pendapatan daerahnya sendiri dapat mendukung anggaran belanja daerah. Sumber utama pembangunan daerah harus dapat dibiayai dari pendapatan asli daerah sehingga daerah tidak

bergantung pada subsidi pemerintah pusat; dengan demikian, dengan dilaksanakannya desentralisasi, daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal dan akan memacu kreativitas pemerintah daerah sehingga mampu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di daerah.

Tabel 1. 1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali
Tahun 2018-2020 (ribu rupiah)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Kab. Jembrana	126,477,267	133,698,784	148,045,103
Kab. Tabanan	363,370,469	354,558,239	313,042,530
Kab. Badung	4,555,716,407	4,835,188,460	2,116,974,302
Kab. Gianyar	770,204,849	997,478,368	545,869,873
Kab. Klungkung	186,974,284	225,063,772	220,893,875
Kab. Bangli	122,686,254	127,040,436	104,325,150
Kab. Karangasem	200,361,247	233,013,033	219,176,733
Kab. Buleleng	335,555,494	365,595,301	318,986,891
Kota Denpasar	940,110,335	1,010,779,481	731,261,281

Sumber: Survei Statistik Keuangan Daerah, BPS Provinsi Bali.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan disetiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Dari sembilan Kabupaten/Kota tersebut yang memiliki kontribusi terbesar tahun 2020 yakni Kabupaten Badung sebesar Rp 4.835.188.460 ribu, kemudian diikuti oleh Kabupaten Gianyar sebesar Rp 997.478.368 ribu. Bila dilihat dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/ Kota tersebut, maka PAD di Provinsi Bali setiap tahun terus meningkat hingga di tahun 2019.

Menurut UU Kepariwisata No. 9 Tahun 1990, pariwisata merupakan sumber devisa yang penting bagi suatu negara, khususnya pemerintah daerah dimana obyek wisata tersebut berada. Pariwisata adalah suatu perjalanan sementara dari satu lokasi ke lokasi lain dengan maksud tidak mencari nafkah di tempat tujuan tetapi sekedar menikmati perjalanan untuk mencapai kepuasan.

Salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan meningkatkan pendapatan daerah adalah jumlah kunjungan wisatawan baik itu dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Sebagai salah satu daerah di Indonesia dengan kekayaan prospek wisata yang beragam, Provinsi Bali ini memiliki beragam tempat wisata, antara lain untuk alam terbuka, seni, budaya, sejarah, dan pendidikan. Bali juga merupakan tujuan wisata yang memiliki daya pikat tersendiri baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara karena relatif aman, nyaman, dan ramah penduduknya.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Bali
Tahun 2016-2020

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Jumlah
2016	4,927,937	8,643,680	13,571,617
2017	5,697,739	8,735,633	14,433,372
2018	6,070,473	9,757,991	15,828,464
2019	6,275,210	10,545,039	16,820,249
2020	1,069,473	4,596,157	5,665,630

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan disetiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2016 sebesar 4.927.937 orang sampai tahun 2019 selalu mengalami peningkatan sebesar 6.275.210 orang, akan tetapi penurunan terjadi pada tahun 2020 sebesar 1.069.473 orang sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sebesar 8.643.680 orang meningkat menjadi 10.545.039 orang pada tahun 2019 dan kembali terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 4.596.157 orang.

Indikator selain jumlah kunjungan wisatawan yang dapat mempengaruhi PAD adalah jumlah penduduk. Salah satu faktor penentu perbedaan pendapatan antar wilayah adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan faktor penting yang dapat mendorong pembangunan dan perluasan ekonomi, hal ini akan sangat berperan dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk dipandang sebagai pusat pembangunan suatu daerah karena memiliki potensi untuk menjadi subyek pembangunan dengan berpartisipasi secara aktif. Hal ini akan meningkatkan tingkat produksi yang dihasilkan oleh suatu daerah dengan menyediakan konsumen secara masif yang akan membeli dan mengkonsumsi barang-barang produksi. Konsumsi penduduk ini akan menghasilkan permintaan agregat, permintaan yang dihasilkan oleh penduduk akan mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi suatu wilayah. Populasi jumlah penduduk yang tumbuh akan menghasilkan lebih banyak tenaga kerja, dan dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja, kapasitas suatu daerah untuk memproduksi juga dapat meningkat.

Tabel 1.3
Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Bali
Tahun 2016-2020 (juta jiwa)

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2016	2.116,4	2.086,1	4.202,5
2017	2.142,9	2.113,1	4.256,0
2018	2.169,3	2.139,9	4.309,2
2019	2.169,3	2.166,6	4.335,9
2020	2.221,4	2.193,1	4.414,5

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Berdasarkan keterangan tabel 1.3 jumlah penduduk di Provinsi Bali pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebesar 4.202,5 juta jiwa, selanjutnya pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 4.256 juta jiwa, pada tahun 2018 jumlahnya sebesar 4.309,2 juta jiwa, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4.335.9 juta jiwa, pada tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 4.414,5 juta jiwa, selain jumlah penduduk, keberhasilan pembangunan perekonomian suatu wilayah dapat diamati melalui beberapa indikator makro yaitu salah satunya dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ditentukan sebagai total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unsur usaha di suatu daerah selama periode waktu tertentu, merupakan indikator lain yang digunakan untuk menilai

tingkat keberhasilan suatu daerah. PDRB dapat ditentukan dengan dasar harga berlaku dan harga konstan. Nilai tambah dari produk dan jasa yang ditentukan dengan menggunakan harga tahun berjalan disebut sebagai PDRB atas dasar berlaku. Sementara PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan evolusi perekonomian riil secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi, PDRB atas dasar harga berlaku nominal dapat mengungkapkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah dan variasi strukturnya. ekonomi daerah.

Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya pembangunannya. Dengan demikian, besaran PDRB tiap daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi dan faktor produksinya.

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan PDRB di Bali Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2018-2020 (Persen)

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan PDRB/Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Persen)		
	2018	2019	2020
Kab. Jembrana	5.59	5.56	-4.98
Kab. Tabanan	5.71	5.58	-6.17
Kab. Badung	6.73	5.81	-16.55
Kab. Gianyar	6.01	5.62	-8.4
Kab. Klungkung	5.48	5.42	-6.38
Kab. Bangli	5.48	5.45	-4.1
Kab. Karangasem	5.44	5.5	-4.49
Kab. Buleleng	5.6	5.51	-5.8
Kota Denpasar	6.42	5.82	-9.43
Provinsi Bali	6.31	5.6	-9.33

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Tabel 1.4 menunjukkan PDRB di sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali menurun disetiap tahunnya, dari sembilan Kabupaten/Kota laju pertumbuhan terbesar berada di Kabupaten Badung dengan laju pertumbuhan tahun 2018 sebesar 6,73 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 5,81 persen dan terus menurun pada tahun 2020 sebesar -16,55 persen, penurunan laju pertumbuhan disusul oleh Kota Denpasar dengan laju pertumbuhan di tahun 2020 sebesar -9,43 persen. Jika dilihat dari keseluruhan PDRB di Kabupaten/ Kota tersebut, maka PDRB Provinsi Bali setiap tahun terus menurun hingga tahun 2020.

Alasan peneliti memilih seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sebagai obyek penelitian adalah karena kabupaten atau kota di Provinsi Bali memiliki keragaman budaya yang sangat luas baik dari kawasan wisata maupun sumber daya alam yang dapat mendukung sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu prioritas pembangunan, menggerakkan perekonomian masyarakat, sehingga berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu setiap tahunnya jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tidak sama di setiap kabupaten atau kota di provinsi Bali.

Dalam Islam pun sudah menjelaskan mengenai pendapatan asli daerah itu sendiri yang tersirat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Ma'arij ayat 24-25, Surah At-Thalaq ayat 7 dan Surah An-Nisa ayat 58 berikut ini:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahan:

“*dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan baguan tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta*” (QS. Al-Ma’arij: 24-25)

Maksud dari ayat diatas yaitu, pajak kekayaan pribadi atau sejumlah uang tertentu wajib diberikan kepada orang yang membutuhkan (orang miskin) karena kewajiban yang telah ditetapkan (oleh pemerintah daerah) bukan karena kebajikan seseorang. Hal ini harus dilakukan dengan sadar bahwa sebagian dari harta mereka (pemberi) adalah ada hak yang harus dihibahkan untuk orang yang lebih membutuhkan.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahan:

“*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*” (QS. At-Thalaaq: 7)

Maksud dari ayat diatas adalah orang yang kaya harus memberi nafkah sesuai ukuran kesanggupannya bukan memberi nafkah layaknya orang miskin dan kabar gembira bagi mereka yang membutuhkan Allah akan menghilangkan

kesukaran dan beban mereka. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk kemudian diberikan kepada seluruh masyarakat berupa fasilitas layanan publik, pendidikan, dan sosial demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa: 58)

Maksud ayat tersebut adalah pemerintah daerah dalam hal ini sebagai penyelenggara pemerintahan harus menjalankan amanat yang diberikan oleh masyarakat dan mendistribusikan hak-hak yang menjadi kewajiban secara adil dan merata demi pertumbuhan ekonomi dengan meminimalkan ketimpangan sosial yang ada.

Berdasarkan latar belakang informasi di atas, jumlah wisatawan, jumlah penduduk, dan produk domestik regional bruto mempunyai hubungan positif dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mendorong penelitian dan pendalaman

lebih lanjut Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kajian “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021)”.

B. Batasan Masalah

Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Maka penelitian ini akan dibatasi oleh beberapa faktor terpenting saja yang dianggap berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, yaitu Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto. Data yang di gunakan adalah data tahunan yaitu pada periode tahun 2017-2021 Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali?
3. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali?

4. Apakah variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto secara bersama-sama berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui:

1. Menganalisis bagaimana pengaruh faktor Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali.
2. Menganalisis bagaimana pengaruh faktor Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali.
3. Menganalisis bagaimana pengaruh faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis dan pembaca,
Hasil penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis dan pembaca untuk dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dibidang ekonomi khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya,
Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah intelektualitas dan aktualitas diri serta sebagai referensi atau acuan bagi studi tentang Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto atau objek penelitian sejenis.
3. Bagi masyarakat,
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan berupa informasi yang berarti bagi masyarakat luas mengenai kondisi perekonomian Provinsi Bali.
4. Bagi pemerintah terkait,
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan acuan pengambilan kebijakan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya mendorong perekonomian daerah sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang adil dan Makmur.